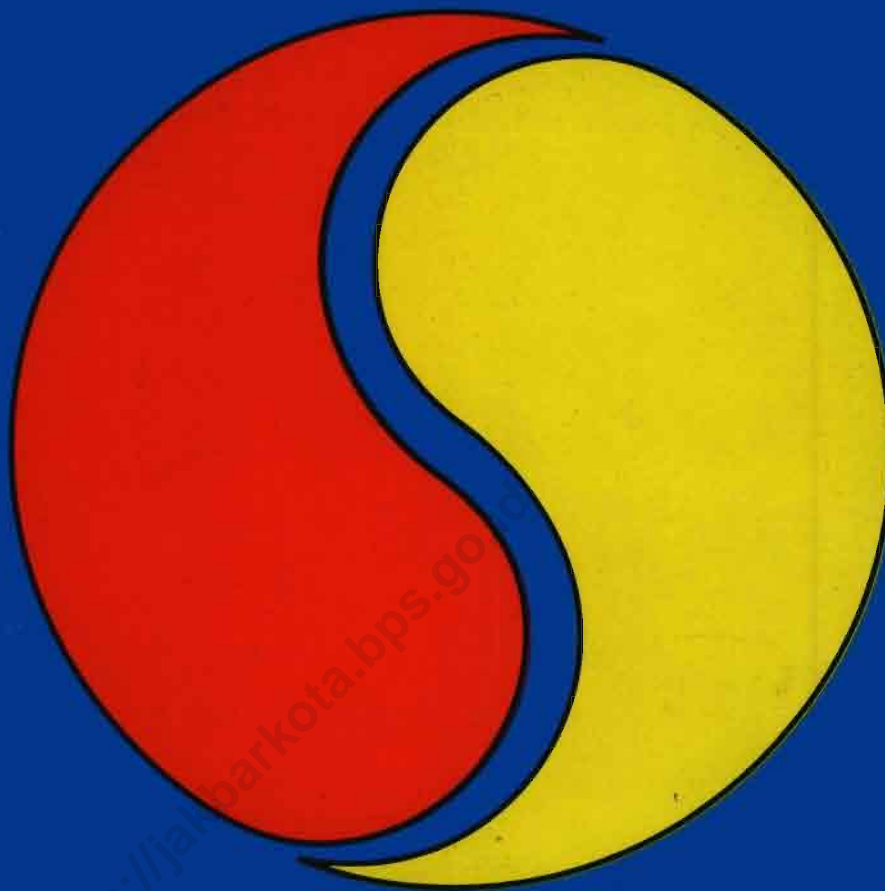




KATALOG 9205 3174

**INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
KOTAMADYA JAKARTA BARAT
TAHUN 1999**



BPS BADAN PUSAT STATISTIK
KOTAMADYA JAKARTA BARAT

10.02.01.040

Buku : 1

[4 Buku]



KATALOG 9205 3174

**INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
KOTAMADYA JAKARTA BARAT
TAHUN 1999**

NO. FUSTAKA :
ISBN
MILIK
PERPUSTAKAAN BPS PROVINSI

<https://jarkota.bps.go.id>

PERPUSTAKAAN
Badan Pusat Statistik Provinsi
DKI

WILDA:

ARBIT

BPS

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

DAFTAR ISI

	Hlm
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab. I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Metodologi Penelitian	2
1.4 Keluaran/Output	3
Bab. II. Kependudukan	
2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	4
2.2 Kepadatan Penduduk	8
2.3 Pendidikan	10
2.4 Buta Huruf	11
Bab. III. Ketenagakerjaan	
- Penduduk menurut jenis kegiatan	15
- Penduduk bekerja menurut status pekerjaan	18
- Lapangan usaha penduduk bekerja	19
- Jenis pekerjaan utama	20
Bab. IV. Ekonomi Rumah Tangga	
- Sumber pendapatan	26
- Klasifikasi pengeluaran perkapita	27

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	hlm.
1.	Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan tahun 1961-1999	6
2.	Jumlah penduduk menurut kecamatan tahun 1980-1990	7
3.	Kepadatan penduduk menurut kecamatan	9
4.	Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tahun 1990, 1995 dan 1999	12
5.	Tingkat buta huruf penduduk umur 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin tahun 1990 dan 1999	13
6.	Penduduk umur 10 tahun ke atas menurut status perkawinan dan jenis Kelamin tahun 1990, 1995 dan 1999	13
7.	Banyaknya rumah tangga tahun 1990, 1995 dan 1999	14
8.	Persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut jenis kegiatan tahun 1990, 1995 dan 1999	17
9.	Tiga lapangan usaha utama penduduk yang bekerja tahun 1990, 1995 dan 1999	19
10.	Persentase angkatan kerja menurut kelompok umur tahun 1990, 1995 dan 1999	21
11.	Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama tahun 1990, 1995 dan 1999	22
12.	Penduduk menurut jenis pekerjaan utama	23
13.	Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 1990, 1995 dan 1999	24

14. Penduduk yang bekerja menurut jam kerja seminggu yang lalu menurut jenis kelamin tahun 1998 dan 1999	24
15. Persentase penduduk menurut pengeluaran perkapita per bulan tahun 1997 - 1999	28
16. Persentase rumah tangga menurut sumber pendapatan utama per kotamadya tahun 1999	29
17. Tempat memperoleh kebutuhan pangan tahun 1999	29
18. Rata - rata pengeluaran perkapita perbulan menurut kelompok makanan dan non makanan	30
19. Persentase rumah tangga yang mengalami kesulitan keuangan selama setahun yang lalu menurut kotamadya tahun 1999	30
20. Persentase rumah tangga yang mengalami kesulitan keuangan selama setahun yang lalu dan pihak yang dihubungi untuk mengatasinya tahun 1999	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ditinjau dari sudut ekonomi, sosial dan budaya. Meningkatnya atau menurunnya taraf hidup erat kaitannya dengan kesejahteraan, rasa aman, rasa memiliki dan rasa percaya diri dari setiap individu dan kelompok masyarakat.

Pembangunan masyarakat perkotaan pada dasarnya sangat tergantung dari pemberdayaan komunitas masyarakat yang erat kaitannya dengan rasa kebersamaan tempat tinggal (RT/RW) ataupun kelompok-kelompok kecil yang sangat intens memperhatikan wilayah tempat tinggal, kelompok ini bisa dalam organisasi / paguyuban seperti olah raga, gotong royong dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan Pembangunan yang dijabarkan dalam program tahapan lima tahunan (PELITA) telah banyak kemajuan dan peningkatan yang dinikmati oleh masyarakat, namun ada beberapa kelemahan yang terjadi, masyarakat lebih sering dianggap sebagai "objek pembangunan" , segala sesuatunya berasal dari atas (Top Down) dan masyarakat hanya menerima program tanpa dapat ikut merencanakan kebutuhan, dari sudut pandang Pemerintah dengan cara ini segala sesuatu dapat dikontrol mekanismenya dengan program, tapi mengalami kelemahan yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Perubahan pola pikir Pembangunan dengan paradigma baru, disirni telah mencoba untuk mengadaptasi Pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terlepas pula peran sertanya dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan kegiatan.

Berbicara tentang hasil Pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan, tentu tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan manusia seutuhnya dalam bentuk kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Tersedianya Indikator Keberhasilan Pembangunan perlu dilakukan evaluasi secara terus menerus, hal ini dimaksudkan untuk memantau hasil Pembangunan serta perkembangannya, sehingga pada gilirannya akan mencerminkan keberhasilan pembangunan itu sendiri.

1.2 Tujuan Penelitian

Penyusunan Indikator Keberhasilan Pembangunan bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan informasi dari hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta khususnya oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Jakarta Barat.

Diharapkan dari indikator-indikator ini dapat disajikan dan dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan serta evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya.

Adanya Indikator ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan gambaran tentang peningkatan taraf pemerataan dan perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh sektoral baik instruksi pusat dan daerah.
2. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan program perencanaan (program oriented and outcome) yang didasarkan pada skala kebutuhan bukan keinginan.

1.3 Metodologi Penelitian

Seperti disebutkan diatas bahwa penyusunan Indikator Keberhasilan Pembangunan didasarkan dari data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari lapangan yang disusun khusus untuk itu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung ke rumah tangga yang telah dipilih secara sampel.

Tahapan dalam penentuan rumah tangga sampel :

- Tahap pertama : Sampling frame yang digunakan berasal dari Susenas 1999 oleh BPS Pusat, hal ini dimaksudkan untuk dapat membandingkan antara hasil Susenas 1999 dengan data

Indikator Keberhasilan Pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2000. Dari sampel Susenas dalam bentuk blok sensus terpilih sebanyak 22 blok sensus yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan. Untuk selanjutnya dilakukan listing (pendaftaran) rumah tangga yang berada dalam masing-masing blok sensus.

- Tahap kedua : Dari setiap blok terpilih diambil sampel sebanyak 500 rumah tangga secara systematik sampling.
- Tahap ketiga : Wawancara langsung kepada rumah tangga terpilih

1.4 Hasil / Keluaran

Hasil penelitian berupa publikasi yang berisi tentang Indikator Keberhasilan Pembangunan Kotamadya Jakarta Barat yang meliputi tentang keterangan demografi, pendidikan, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga serta persepsi masyarakat tentang berbagai indikator.

BAB II

KEPENDUDUKAN

Penduduk atau masyarakat sebagai sasaran pembangunan tidak semata dianggap sebagai objek, tapi harus diikuti sebagai subjek pembangunan, karena tanpa memberdayakan penduduk sebagai pelaksana dan pemantau hasil pembangunan maka kegiatan yang hanya dilaksanakan oleh pemerintah (ada anggapan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah) akan memberikan hasil yang berbeda bila mengikut sertakan peranserta masyarakat.

Kaitannya dengan itu informasi tentang penduduk yang meliputi tentang jumlah persebaran, struktur maupun komposisi dan kepadatan sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan, hal ini tak terlepas dari kondisi dan situasi pada masa lalu , sehingga pola atau trend ini merupakan dasar kajian untuk penyusunan perencanaan yang lebih mendekati kenyataan.

2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kotamadya Jakarta Barat masih menunjukkan adanya pertumbuhan yang relatif tinggi dari tahun ke tahun, meskipun berbagai program telah diupayakan untuk membendung pertumbuhan maupun berbagai perubahan komponen demografi tetap saja menarik untuk diamati.

Pada dasarnya pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga komponen penting yaitu :

1. Kelahiran (fertilitas)
2. Kematian (mortalitas)
3. Keluar masuk Penduduk (migrasi)

Antar ketiga komponen tadi tidak berdiri sendiri tetapi saling mengkait, seperti komponen kelahiran yang menyebabkan pertumbuhan alamiah, besarnya angka kelahiran dibandingkan dengan angka kematian yang semakin menurun ini terkait dengan semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat baik ditinjau dari sisi kesehatan dan peningkatan pendapatan.

Namun ada fenomena yang lebih penting lagi untuk diamati, disatu sisi pengembangan fasilitas perkotaan mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk luar untuk datang (migrasi masuk) ke DKI Jakarta khususnya Jakarta Barat, kondisi ini semakin mempercepat pertumbuhan penduduk, sehingga dalam kurun waktu 30 tahun penduduk Jakarta Barat naik 433,34 %, dari 469.453 jiwa tahun 1961 menjadi 1.820.019 pada tahun 1990 dan tahun 1999 ini jumlahnya meningkat menjadi 2,345 juta jiwa.

Upaya dalam menghadang laju pertumbuhan bukan tidak dilakukan, berbagai kegiatan seperti penerapan Keluarga Berencana, transmigrasi dan sebagainya, usaha ini telah berperan menurunkan laju pertumbuhan, walaupun jumlah secara absolut tetap meningkat.

Laju pertumbuhan antara tahun 1961 - 1971 tercatat 5,80 persen. dan untuk tahun 1990 - 1999 menurun menjadi 2,86 persen, sedangkan Propinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu yang sama turun dari 3,97 persen menjadi 1,73 persen.

Kalau diperhatikan dari sejak tahun 1961 sampai tahun 1999 yang lalu, pertumbuhan paling tinggi terjadi antara tahun 1961 - 1971, kemudian tahun 1971-1980 angka ini mengalami penurunan, kalau kondisi seperti ini berjalan terus, sehingga pada tahun 2000 akan terdapat penurunan yang lebih banyak lagi. Hal ini berarti bahwa penambahan penduduk yang disebabkan oleh migrasi masuk cukup tinggi yang diimbangi pula oleh migrasi keluar yang tinggi pula, sehingga selisih yang betul tinggal di Jakarta Barat relatif sedikit.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan di Jakarta Barat
Tahun 1961 - 1999**

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan
1961	469.543	-
1971	820.726	-
1980	1.231.188	-
1990	1.820.019	-
1999	2.345.700	-
1961 - 1971		5,80
1971 - 1980		4,56
1980 - 1990		3,96
1990 - 1999		2,86

Penurunan tingkat kelahiran akan berpengaruh terhadap penurunan laju pertumbuhan penduduk, sedangkan penurunan tingkat kematian justru akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk, untuk Jakarta Barat kedua komponen ini tidak berpengaruh banyak dibandingkan dengan laju pertumbuhan migrasi masuk yang tinggi.

Kalau dilihat perkecamatan juga kelihatan bahwa laju pertumbuhannya juga tidak sama, ada kecenderungan daerah Sentra Primer Baru (SPB) mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, daerah / kecamatan ini yang memang dikembangkan sebagai kawasan pemukiman dan disekelilingnya dibangun sarana perkotaan yang lengkap, sehingga untuk kebutuhan segala sesuatunya mereka tidak perlu keluar ke kecamatan lain . termasuk Sentra Primer Baru adalah Kecamatan Kebon Jeruk dan Kembangan dengan laju pertumbuhan 9,19 % antara tahun 1980-1990, kondisi yang

hampir sama terdapat pula pada Kecamatan Cengkareng dan Kalideres dengan laju pertumbuhan 8,62 %, pertumbuhan ini sedikit banyak dipengaruhi pula oleh peruntukan wilayah dalam RUTR / RTRW bahwa daerah ini adalah daerah kegiatan industri yang ramah lingkungan, dimana sebagian besar tenaga kerjanya berasal dari luar Jakarta Barat atau DKI Jakarta yang dapat disebut sebagai migran.

Lain halnya dengan dua kecamatan yaitu Kecamatan Taman Sari dan Tambora mengalami pertumbuhan negatif, maksudnya jumlah penduduk pada tahun 1980 jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 1990. Ini berarti bahwa terjadi perpindahan penduduk keluar kecamatan lebih banyak dibandingkan dengan yang masuk ke kecamatan tersebut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhannya Tahun 1980 -1990

Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan
	1980	1990	1980 - 1990
Kebon Jeruk	171.346	261.636	9,19
Kembangan		157.239	
Cengkareng	131.711	372.332	8,62
Kalideres		175.496	
Grogol Petamburan	401.544	241.887	1,35
Palmerah		217.502	
Tambora	270.485	263.607	-1,26
Taman Sari	150.102	130.326	-1,40
Jumlah.	1.231.188	1.820.019	3,96

Sumber : Sensus Penduduk 1980 -1990

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Keberhasilan Pembangunan merupakan yang pertama kali diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Barat, yang memberikan informasi tentang hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terbitnya publikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peningkatan taraf pemerataan dan perkembangan yang terjadi akibat positif dari pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan dana APBD DKI Jakarta tahun 2000 yang tertuang dalam Proyek Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Kodya Jakarta Barat dengan Nomor Proyek 2P.0.16.2.02.008.

Kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini diucapkan terima kasih, saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

Semoga bermanfaat adanya.

Jakarta, Desember 2000
BPS Kodya Jakarta Barat
Kepala,



MAHYUDIN
NIP. 340002232

2.2 Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membawa dampak yang luas terhadap bidang lain, bila tidak diantisipasi secara dini, terutama dalam penyediaan prasarana perkotaan, lingkungan pemukiman, tingginya tingkat pengangguran, kondisi ini berjalan secara tidak merata pada masing-masing kecamatan maupun kelurahan.

Dari 8 (delapan) kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan di Jakarta Barat mempunyai tingkat kepadatan yang tidak sama, hal ini sangat dipengaruhi oleh strategis atau tidaknya dilihat dari sisi kegiatan ekonomi, karena lazimnya para urbanis cenderung bertempat tinggal di pusat kegiatan perdagangan / industri yang sekaligus tempat ia mengembangkan usahanya, disamping itu juga dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan yang kental antar saudara atau teman sekampung.

Jakarta Barat dengan luas wilayah 126,08 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 1990 tercatat 1.820.019 jiwa, berarti kepadatannya mencapai 14.435 jiwa / km². Jumlah ini meningkat terus hingga pada tahun 1995 kepadatan ini menjadi 17.027 jiwa / km² dan pada tahun 1999 meningkat menjadi 18.335 jiwa / km².

Seterusnya dapat pula dilihat, bahwa Kecamatan Tambora dengan luas wilayah relatif kecil tapi mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi dibanding dengan kecamatan ini, keadaan ini telah berjalan cukup lama (lihat Sensus Penduduk 1980).

Akibat dari kondisi seperti ini tentu saja mengakibatkan distorsi dan minimnya sarana pemukiman yang mengakibatkan tumbuhnya kawasan kumuh yang sebetulnya tidak layak huni.

Tabel 3. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 1980, 1990 dan 1999

Kecamatan	Luas Km ²	<u>Kepadatan Tahun</u>		
		1980	1990	1999
Kebon Jeruk	17,51		14.942	18.978
Kembangan	24,64		6.381	8.105
Cengkareng	27,93		13.331	16.932
Kalideres	27,39		6.407	8.138
Grogol Petamburan	11,29		21.425	27.212
Palmerah	7,54		28.846	36.639
Tambora	5,41		48.726	61.088
Taman Sari	4,37		29.823	37.879
Jakarta Barat	126,08		14.435	18.335

Lain halnya dengan Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Kembangan, dengan luas wilayah masing-masing 21,72 persen dan 19,54 persen dari luas Jakarta Barat 126,08 km², tapi jumlah penduduknya relatif rendah dengan kepadatan sedikit diatas 8000 jiwa / km². Ada kategori daerah yang ketiga dengan kepadatan yang "sedang" karena dengan kepadatan yang masih dibawah kepadatan Jakarta Barat.

Perlu diketahui bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas lingkungan pemukiman tempat tinggal seperti Proyek Perbaikan Kampung MHT, rumah susun, perbaikan dengan dana Inpres dan Instruksi Gubernur (In-Gub) tetapi belum dapat mengangkat harkat lingkungan

tempat tinggal yang masih dibawah standard rata-rata sampai kondisi yang memuaskan.

2.3 Pendidikan

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk dapat sejajar dengan bangsa lain. Usaha dibidang pendidikan tidak semata merupakan tanggung jawab pemerintah tetapi setiap anggota masyarakat yang menyadari betapa pentingnya program ini, sehingga pemerintah mendorong tumbuh dan kembangnya kegiatan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak swasta mulai dari tingkat TK, SD, SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi.

Program penyediaan fasilitas pendidikan , mulai penyediaan jumlah sekolah, gedung, peningkatan mutu guru melalui penataran / pelatihan baik program regional maupun nasional serta peningkatan masa wajib belajar pendidikan dasar dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980, proporsi penduduk tidak sekolah / tidak tamat SD lebih dari seperlima penduduk Jakarta Barat (21,979). Lima tahun kemudian angka ini menurun hampir lima persen yaitu 17,66 dan pada tahun 1999 angka ini juga menurun lagi menjadi 16,94 persen. Adanya program wajib belajar tadi membawa dampak positif sehingga tahun 1999 jumlah tamat SLTP telah meningkat cukup baik dibandingkan dengan tahun 1995 yaitu dari 20,62 % menjadi 24,28 % pada tahun 1999.

Kalau dilihat jenjang pendidikan lebih tinggi lagi, terdapat pula kenaikan. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk dan keberhasilan program pembangunan di sektor pendidikan telah menunjukkan hasil nyata. Jika dilihat dari sisi jumlahnya, memang diakui masih terdapat kendala, karena untuk memasuki tingkat ini diperlukan biaya yang tidak sedikit, dilain pihak peningkatan pendapatan

belum dapat mengikuti perkembangan, sehingga sangat sedikit yang tamat perguruan tinggi.

2.4 Buta Huruf

Bagi penduduk DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan komunikasi ada " ganjalan " yang harus dituntaskan, yaitu kemampuan setiap orang untuk baca tulis, baik melalui pendidikan formal bagi anak usia sekolah atau program Paket A dan Paket B dibidang pendidikan.

Berkaitan dengan program mencerdaskan kehidupan bangsa, masih banyak hal yang harus dilakukan terutama menjadikan penduduk "melek huruf dan angka", sehingga setiap orang akan dapat memakai dan memanfaatkan media yang ada, terutama era informasi dalam menyongsong globalisasi yang semakin terasa.

Pada tahun 1990 di Jakarta Barat terdapat hampir lima persen penduduknya tidak dapat baca tulis (4,88 %), jumlah ini lebih besar dikalangan wanita dibanding dengan laki-laki. Besarnya angka buta huruf untuk wanita barangkali disebabkan adanya anggapan yang masih melekat dimasyarakat bahwa sekolah tidak perlu untuk wanita, dan ini juga umumnya terjadi pada wanita dengan usia diatas usia sekolah, dapat diduga disebabkan karena kurangnya fasilitas pendidikan dimasa lalu dan terbatasnya biaya yang dipunyai rumah tangga.

Seiring dengan perjalanan waktu dan usaha yang tiada henti, besarnya angka buta huruf ini dapat diperkecil, sehingga dalam waktu \pm 10 tahun dapat diturunkan persentasenya khususnya untuk wanita lebih dari 60 persen, angka ini lebih besar dari penurunan pada tingkat laki-laki.

Tabel 4. Presentase Penduduk Umur 10 Th Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1990, 1995 dan 1999

Penduduk yang di tamatkan	Tahun		
	1990	1995	1999
TB.BD	21,97	17,66	16,96
Tamat SD	32,95	30,457	29,27
Tamat SLTP	18,54	20,62	24,28
Tamat SLTA	22,14	25,76	26,79
Tamat DII	0,38	0,48	0,53
Tamat DIII	1,72	1,97	2,02
Tamat Universitas	2,29	3,05	3,39

Sumber : *Sensus Penduduk 1990*

Supas 1995

Susenas 1999

**Tabel 5. Tingkat Buta Huruf Penduduk Umur 10 Th
Keatas menurut jenis kelamin Tahun 1990 dan 1999**

Tahun	Jakarta Barat			DKI Jakarta		
	Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
	L	P	L+P	L	P	L+P
1990	2,35	7,35	4,88	1,85	6,02	3,93
1995	1,48	4,91	3,20	1,11	3,75	2,43
1999	1,14	2,91	2,05	1,06	2,92	2,00

**Tabel 6. Penduduk Berumur 10 Th Menurut Status
Perkawinan dan jenis kelamin Tahun 1990, 1995 dan 1999**

Status Perkawinan		Tahun		
		1990	1995	1999
Belum Kawin	L	48,75	44,49	49,06
	P	41,50	44,14	44,42
Kawin	L	49,82	48,91	49,39
	P	50,33	49,01	49,88
Cerai Hidup	L	0,57	0,41	0,39
	P	2,75	1,73	1,63
Cerai Mati	L	0,86	1,19	1,16
	P	5,42	5,12	5,07

Tabel 7. Banyaknya Rumah Tangga

Tahun	Kepala Rumah Tangga
1990	338.465
1995	476.928
1999	550.392

<https://jakbarkota.bps.go.id>

BAB III

KETENAGA KERJAAN

Struktur tenaga kerja suatu daerah sangat dipengaruhi oleh sumber / potensi ekonomi yang berada di daerah tersebut, makin besar dan berkembang daerah tadi maka makin banyak pula tenaga yang dibutuhkan. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial demografis yang berkaitan dengan masalah migrasi.

Migrasi dalam uraian berikut dapat didefinisikan adalah datangnya penduduk dari desa ke kota dengan maksud / tujuan utamanya adalah mencari pekerjaan atau mendapatkan kesempatan untuk berusaha atau mengembangkan usaha yang tadinya ada / belum ada di desa seperti diketahui perkembangan lapangan usaha yang tumbuh / berkembang di desa tidak secepat yang ada di perkotaan, hal ini ditambah lagi oleh kondisi yang ada tidak memikat penduduk untuk tetap berusaha di desa. Apa yang diuraikan di atas hanyalah sebagian kecil dari keadaan yang berkembang di desa, di lain sisi perkembangan DKI Jakarta pada umumnya atau Kodya Jakarta Barat khususnya sangat menarik mereka untuk ikut berkecimpung dan mencoba pula mengikuti keberhasilan yang telah dapat dicapai oleh penduduk desa yang telah lebih dulu melakukan migrasi ke Jakarta Barat.

Dengan relatif tingginya migrasi yang datang dengan tingkat penduduk dan ketampilan yang juga kurang memadai, maka kesempatan mereka untuk ikut berkiprah di sektor formal juga relatif tipis dibandingkan dengan penduduk perkotaan yang juga membutuhkan lapangan kerja. Guna mengurangi beban tersebut, pemerintah daerah berupaya pula untuk membantu mereka dengan menciptakan program modal kerja, melatih kerampilan dan usaha lainnya untuk meningkatkan kualitas penduduk tadi. Sejalan dengan itu pencaangan wajib belajar sampai pada tingkat SLTP dan SLTA, akan berdampak terhadap kecenderungan orang untuk masuk kerja pada usia yang relatif muda.

Bila diamati setiap tahun terjadi penambahan penduduk yang memasuki lapangan pekerjaan dan membutuhkan pekerjaan, sumbernya berasal dari migrasi, tamat sekolah atau seseorang yang awalnya mengurus rumah tangga kemudian pindah sebagai angkatan kerja.

Pada tahun 1990 jumlah angkatan kerja lebih rendah dibandingkan dengan bukan angkatan kerja masing-masing sebesar 48,87 persen dan 50,13 persen. Indikator yang terdapat didalamnya, porsi mereka yang bekerja, 47,09 persen, sedangkan pencari kerja terdapat 2,78 persen. Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa dari 100 orang bekerja kan menanggung beban 1 sampai 2 anggota rumah tangga, ini berarti penghasilan yang didapat untuk membiayai 1 sampai 2 orang lainnya.

Lima tahun kemudian komposisi antar angkatan kerja dan bukan angkatan kerja tidak mengalami perubahan yang berarti, bahkan komposisi angkatan kerja semakin menurun dengan persentase jumlah orang bekerja juga mengalami penurunan sebesar 2,90 persen, namun pencari kerja meningkat dari 2,78 persen pada tahun 1990 menjadi 5,31 persen atau naik rata-rata 0,50 persen setiap tahunnya.

Adanya program wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan pada tahun 1994., secara nyata meningkatkan partisipasi orang yang bersekolah dari 21,39 persen menjadi 25,10 persen, dengan demikian memberikan dampak yang nyata di sektor pendidikan dan menurunnya pencari kerja.

Memasuki akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999 terjadi kondisi yang jauh berbeda dengan periode sebelumnya, antara lain krisis ekonomi yang memporak porandakan sendi perekonomian, mengakibatkan sektor riil tidak berfungsi sepenuhnya malahan cenderung stagnasi. Akibat kondisi yang tidak menguntungkan, banyak perusahaan / usaha yang terpaksa mengurangi jumlah pegawainya dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Akibatnya tentu meluas pada kegiatan kegiatan lain, seperti meningkatnya jumlah orang yang mencari pekerjaan.

Peningkatan orang yang mencari pekerjaan kelihatannya bersumber dari orang yang tadinya sekolah, saat itu terpaksa meninggalkan bangku sekolah lalu berusaha mencari pekerjaan atau bekerja secara mandiri seperti pedagang kaki lima yang jumlahnya semakin meningkat.

Tabel 8. Presentase Penduduk Usia 10 Th Keatas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 1990, 1995 dan 1998

Jenis Kegiatan	Tahun / Presentase		
	1990	1995	1998
<u>Angkatan Kerja</u>	48,87	48,50	51,98
Bekerja	47,09	43,19	44,36
Mencari Kerja	2,78	5,31	7,62
<u>Bkn Angkatan Kerja</u>	50,13	51,50	48,02
Sekolah	21,39	25,10	21,96
Mengurus R. Tangga	22,86	22,17	21,82
Lainya	5,88	3,23	4,42

Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Sebaran penduduk menurut status pekerjaan, kelihatannya masih bertumpu sebagai buruh / karyawan, ini berarti bahwa mereka mempunyai jiwa atau kemampuan untuk mengelola usaha secara mandiri masih rendah. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi penurunan jumlah seperti pada tahun 1990 hampir tiga per empat (72,25 %) mereka yang bekerja dengan status buruh dan karyawan, lima tahun kemudian angka ini menurun menjadi 66,93 %, ini berarti dalam jangka waktu tersebut terjadi penurunan rata-rata 1,06 % pertahunnya, kondisi ini tampaknya relatif sama dengan tahun 1999.

Sejalan dengan program dan paradigma baru untuk menampung jumlah tenaga kerja yang selalu meningkat, maka program diarahkan pada " **wira usaha baru** " , pada kondisi ini masyarakat diarahkan untuk membuat / membuka usaha sendiri / berkelompok dengan memanfaatkan peluang usaha yang ada, sedangkan untuk kebutuhan modal diberikan dengan secara bergulir baik melalui program terpadu pengentasan kemiskinan maupun program bantuan lainnya.

Tahun 1990 jumlah mereka yang berusaha sendiri relatif sedikit (15,37 %), tahun 1995 meningkat menjadi 23,21 % bahkan pada tahun 1999 terjadi lebih dari seperempat mereka yang bekerja (25,70 %) dengan status berusaha sendiri. Disamping itu mereka yang berusaha dengan menggunakan tenaga kerja buruh juga mengalami kenaikan dari 7,90 % pada tahun 1990 menjadi 8,56 % pada tahun 1999.

Pada sisi lain ditemukan pula 3,45 % dari penduduk yang bekerja tadi dengan status pekerja tak dibayar/ pekerja keluarga, tahun 1999 jumlah ini tercatat sebanyak 4,00 persen kenaikan jumlah pekerja keluarga ini adalah salah satu katub pengaman untuk mengatasi pengangguran. Mereka ini termasuk dalam satu keluarga (ayah, anak) yang kemungkinan mereka tidak bekerja lagi (pensiun, kena PHK) atau mereka yang baru saja tamat sekolah atau terpaksa putus sekolah, sambil menunggu lowongan pekerjaan yang ada.

Lapangan Usaha

Berkaitan dengan perkembangan ekonomi sektoral yang bertumpu pada sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan, seperti tertuang dalam Produk Domestik Regional Bruto maka sebagian besar dari mereka yang bekerja, lapangan usahanya sama, hanya berbeda dalam pencapaiannya saja, seperti pada tahun 1990, tiga lapangan usaha yang dominan dari mereka yang bekerja adalah sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa. Lima tahun kemudian terjadi pergeseran lapangan usaha tersebut, sektor perdagangan lebih besar dari sektor industri pengolahan, bahkan sektor jasa lebih banyak, kondisi ini juga sama pada tahun 1999 yang lalu.

**Tabel 9. Tiga Lapangan Usaha Utama Penduduk yang Bekerja
Th 1990 , 1995 , 1999**

Lapangan Usaha	Ranking		
	1990	1995	1999
Industri Pengolahan	1	3	3
Perdagangan	2	1	1
Jasa - jasa	3	2	2

Adanya pergeseran lapangan usaha ini juga terjadi pada sektor pertanian dan pertambangan yang dari waktu ke waktu mengalami penurunan, untuk usaha pertanian perkembangannya dari waktu ke waktu semakin berkurang perannya, sehingga jumlah tenaga kerja yang berkecimpung disana juga semakin sedikit, lain halnya sektor pertambangan yang tidak ada kegiatan disini. Kenaikan jumlah tenaga

kerja di sektor perhubungan dan komunikasi antara lain tumbuhnya kegiatan usaha baru dan mempunyai prospek yang baik adalah wartel-wartel atau warung telekomunikasi.

Jenis Pekerjaan Utama

Jenis pekerjaan utama disini adalah jenis kegiatan yang digeluti oleh para pekerja, baik sebagai tenaga produksi, penjualan maupun tenaga profesi lainnya.

Ada tiga jenis pekerjaan utama yang digeluti para pekerja yaitu tenaga penjualan, tenaga tata usaha dan tenaga usaha jasa seperti guru, jasa jahit dan sebagainya. Dari ketiga jenis ini kelihatannya usaha jasa dan tata usaha termasuk kedalam tenaga yang sudah terampil atau paling tidak memerlukan keahlian tertentu, lain hal untuk tenaga penjualan barangkali bisa dilaksanakan oleh setiap orang, walaupun seseorang itu tidak menduduki pendidikan formal yang relatif tinggi, sehingga usaha ini dapat dimasuki oleh siapa saja dan setiap saat ia dapat keluar masuk dalam pekerjaan tersebut, jenis pekerjaan ini banyak menarik migran untuk berusaha di Jakarta, usaha penjualan tadi identik dengan sektor informal dengan porsi hampir sepertiga dari lapangan pekerjaan utama penduduk.

Pada bagian lain ditemukan pula bahwa tenaga penduduk pada dasarnya erat kaitannya dengan industri pengolahan, setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1997 yang lalu sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan yang berarti sehingga penduduk yang tadinya bekerja dibidang industri pengolahan sebagai tenaga produksi semakin menurun porsinya, ini dapat dilihat dari tahun 1990 porsinya hampir dua perlima (39,67 %), pada tahun 1995 mengalami penurunan menjadi sepertiga (33,61 %) dan memasuki tahun 1999 jumlahnya semakin menurun terus sampai lebih kurang sepersepuluhnya (11,17 %). Hal ini kelihatannya disebabkan oleh terjadinya peralihan lapangan usaha ke sektor penjualan.

**Tabel 10. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur
Tahun 1990, 1995 dan 1999**

Umur	Angkatan Kerja			% yang bekerja thd angkatan Kerja		
	1990	1995	1999	1990	1995	1999
10 - 14	1,38	0,79	1,78	87,60	6,19	78,23
15 - 19	11,98	10,62	13,59	87,27	2,39	88,73
20 - 24	19,95	18,39	20,17	88,54	8,30	89,22
25 - 29	19,72	17,60	20,22	94,91	88,91	91,79
30 - 34	14,54	14,12	16,73	98,02	93,67	94,35
35 - 39	10,85	11,35	12,54	98,80	97,01	95,34
40 - 44	7,30	9,21	10,29	99,12	97,54	93,27
45 - 49	5,69	7,50	8,23	99,01	97,82	92,26
50 - 54	4,17	4,82	4,97	99,31	98,43	96,27
55 - 59	2,36	3,04	3,19	99,22	97,11	97,01
60 >	2,00	2,51	2,39	99,24	96,41	96,72
	49,87	84,50	52,03	94,41	89,06	85,34

**Tabel 11. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
Tahun 1990, 1995, 1999**

Pekerjaan Utama	Tahun		
	1990	1995	1999
Berusaha Sendiri	15,37	23,21	25,70
Berusaha tdk dibayar	7,90	7,93	8,56
Buruh / Karyawan	72,25	66,93	61,72
Pekerja tak dibayar	3,45	1,92	4,00

<https://jakbarkota.bps.go.id>

**Tabel 12. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Utama
Tahun 1990, 1995, 1999**

Jenis Pekerjaan Utama	1990	1995	1999
Tenaga Profesional	5,62	7,28	4,85
Tenaga Kepemimpinan	1,37	1,85	2,25
Tenaga TU	14,01	14,51	15,63
Tenaga Pengusaha	23,64	27,96	32,06
Tenaga Usaha Jasa	14,53	14,29	13,32,
Tenaga Produksi	39,67	33,61	11,17
Tenaga Oprasional	0,29	0,50	8,61
Tenaga Kasar	-	-	12,12

**Tabel 13. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha
Tahun 1990, 1995, 1999**

Lapangan Usaha	1990	1995	1999
Pertanian	0,80	0,62	0,45
Pertambangan	0,31	0,27	0,05
Industri	28,13	22,25	21,29
Listrik	0,46	0,88	0,50
Konstruksi	6,27	4,89	4,05
Perdagangan	27,36	30,56	35,57
Komunikasi	6,24	6,11	7,46
Keuangan	6,50	5,57	3,55
Jasa / Lainnya	23,85	28,85	27,05

Tabel 14. Presentase Penduduk Bekerja menurut jam kerja dan jenis kelamin Tahun 1998, 1999

Jumlah Jam Kerja	1998		1999	
	L	P	L	P
< 35 jam	10,73	21,79	9,92	23,21
≥ 35 jam	89,27	78,21	90,08	76,79

BAB IV

EKONOMI RUMAH TANGGA

Pengertian

Rumah tangga yang dimaksud dalam uraian berikut ini adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal bersama yang biasanya mempunyai hubungan keluarga (ayah, anak , mertua, familiy) dan dalam pengelolaan makan dilakukan secara bersama, dalam kelompok ini ada seorang diantaranya dianggap sebagai kepala rumah tangga. Hal ini perlu dijelaskan karena sering terjadi kekeliruan antar kepala rumah tangga dan kepala keluarga (dalam kartu keluarga) , perbedaannya kalau kepala keluarga bisa saja terjadi lebih dari satu dalam rumah tangga, walaupun pengelolaan makan sendiri-sendiri tapi dicakup dalam satu kartu keluarga (untuk administrasi kependudukan).

Kaitan ekonomi rumah tangga adalah kondisi kesejahteraan rumah tangga dilihat dari sisi peningkatan kualitas hidup yang dapat dilihat dari konsumsi baik berbentuk makanan, bukan makanan yang terdiri dari kebutuhan perumahan, pendidikan , pakaian, aneka barang dan jasa dan sebagainya, sehingga dari dua jenis ini akan dapat menggambarkan kondisi kehidupan rumah tangga.

Mengapa memakai ukuran pengeluaran

Dalam setiap kegiatan manusia yang pada dasarnya memerlukan biaya, untuk membiayai biaya tadi kan dicari sumber seperti upah dan gaji, pendapatan usaha, meminjam dan sebagainya, namun kalau dibuat suatu neraca akan selalu terjadi ketidak seimbangan antara sumber penghasilan dengan pengeluaran dimana akan lebih besar pengeluarannya (un balance). Untuk memperkecil perbedaan tadi maka dalam penelitian dan survei yang dilaksanakan oleh BPS selalu ditanyakan dua indikator tadi (pendapatan dan pengeluaran) terutama untuk barang konsumsi. Banyak dari anggota rumah tangga mengkonsumsi makanan yang didapatkan bukan

dari pembelian / produksi sendiri, pemberian pihak lain atau dari hasil produksi yang tidak dikelola tapi dikonsumsi sebagai contoh dapat disebutkan disini seperti seseorang memetik sayuran / buah-buahan di pekarangan yang tidak dijual tapi untuk dimakan sendiri, biasanya terdapat kecenderungan untuk tidak dimasukkan dalam pengeluaran rumah tangga. Untuk konsumsi sayuran tadi, kalau dilihat sisi pengeluaran yang bertitik tolak konsumsi rumah tangga maka itu bagian pendapatan yang harus dicatat dan dikeluarkan kembali sebagai konsumsi rumah tangga, sehingga akhirnya terjadi keseimbangan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

Sumber Pendapatan

Seperti telah disinggung terdahulu pendapatan rumah tangga tidak hanya berasal dari satu sumber, karena dalam kegiatan ekonomi rumah tangga tidak semata dari upah dan gaji, tapi bisa pula dari usaha, maupun dari transfer (iriman) dari luar yang masih anggota rumah tangga tidak melakukan kegiatan ekonomi seperti pensiunan, dapat kiriman dari bukan anggota rumah tangga.

Untuk tahun 1999 yang lalu sumber pendapatan dari rumah tangga sebagian besar tidak hanya dari satu sumber tetapi lebih dari satu seperti upah dan gaji dan usaha rumah tangga, hal ini terjadi karena jumlah anggota rumah tangga yang bekerja lebih dari satu orang dengan kegiatan berbeda (buruh dan pengusaha). Angka tersebut diatas persentasenya hampir tiga per empatnya (70,42 persen).

Sumber pendapatan rumah tangga dari upah dan gaji semata hampir sama besarnya dengan pendapatan yang berasal dari usaha rumah tangga, masing - masing sebesar 14,07 dan 13,47 persen. Data ini memberikan indikasi bahwa porsi pendapatan dari satu sumber relatif kecil, karena itu rumah tangga berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, seperti pagi hari sebagai karyawan/ buruh sore hari berjualan sebagai pedagang kaki lima atau ojek motor yang mangkal di perempatan jalan.

Klasifikasi Pengeluaran Perkapita

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dapat digunakan berbagai indikator, diantaranya adalah besarnya pendapatan, besarnya konsumsi makanan yang dihitung dengan perkapita. Angka perkapita itu didapatkan dari total pengeluaran dibagi dengan jumlah penduduk dalam kelompok yang sama.

Bila diperhatikan dari tiga tahun berturut-turut besarnya angka penduduk yang perkapitanya kurang dari Rp.100.000- per bulan pada tahun 1997 tercatat sebesar hampir 22 persen, tahun 1998 karena terjadinya krisis ekonomi yang berlanjut, serta terjadinya angka inflasi yang cukup tinggi sehingga porsi yang mempunyai pengeluaran perkapita kurang dari Rp.100.000,- meningkat menjadi hampir 36 persen, ini memberikan indikasi pula bahwa krisis ekonomi sangat mempengaruhi tingkat hidup masyarakat, apabila dirata-rata berarti setiap harinya tiap orang mempunyai pengeluaran perkapita hanya Rp.3500,- perhari, didalamnya sudah termasuk untuk konsumsi makanan, perumahan, pendidikan dan sebagainya.

Kalau ditelusuri lebih lanjut kelihatannya tahun 1998 yang lalu terjadi penurunan kualitas hidup ditinjau dari sisi pengeluaran hanya 6,17 persen saja penduduk yang pengeluaran perkapitanya diatas Rp.300.000,- perbulan atau rata-rata Rp.10.000,- perhari. Seterusnya akan terlihat pula jumlah penduduk yang pengeluaran per kapitanya dibawah Rp.150.000,- perbulan hampir separuh dari jumlah penduduk (48,93 %).

Memasuki tahun 1999 terjadi pergeseran, kondisi ekonomi mulai bergerak, pasokan distribusi barang kebutuhan masyarakat tidak bergejolak seperti tahun 1998, timbulnya kegiatan usaha baru yang dilaksanakan oleh penduduk, baik yang terkena PHK maupun tenaga kerja baru. Sehingga porsi yang dibawah Rp.150.000,- perbulan perkapita turun separuhnya dibandingkan tahun 1998 yaitu menjadi 24,96 %.

Sedangkan untuk kelompok pengeluaran di atasnya juga semakin meningkat bahkan yang pengeluaran perkapita diatas Rp.300.000,- perbulan meningkat empat

kali lipat dari tahun 1998, atau komposisinya lebih baik dibanding dengan tahun 1997.

Ada beberapa hal yang menopang untuk mengimbangi pengeluaran yang semakin meningkat tadi yaitu perbaikan penghasilan karyawan (pegawai negeri) serta peningkatan upah minimum regional untuk karyawan swasta.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran perkapita perbulan yang dikelompokkan dalam makanan dan non makanan terjadi kenaikan yang cukup drastis untuk kelompok makanan dari Rp.78.408,- menjadi Rp.153.068,- atau meningkat hampir dua kali lipat (195,22 %), sedangkan non makanan dari Rp.99.005,- menjadi Rp.174.926,- atau meningkat 176,68 persen.

Tabel 15. Persentase Penduduk menurut pengeluaran Perkapita/bulan Tahun 1997, 1998 dan 1999

Klasifikasi Pengeluaran (000)	Tahun		
	1997	1998	1999
< 100	21,99	35,77	7,41
100 – 149	31,50	13,16	17,55
150 – 199	8,19	16,83	22,87
200 – 299	10,30	6,68	18,70
250 – 249	5,77	3,74	10,53
> 300	20,75	6,17	22,83
	100,00	100,00	100,00

**Tabel 16. Presentase rumah tangga menurut sumber pendapatan
Utama per Kotamadya Th 1999**

Kodya	Sumber Pendapatan Utama				Jumah
	Upah / Gaji	Pendapatan Dari Usaha RT	Pendapatan Lain	Lebih dari satu sumber penghasilan	
Jak-Sel	30.14	35.36	4.06	30.44	100,00
Jak-Tim	24.98	32.62	0.80	41.60	100,00
Jak-Pus	7.06	10.78	4.12	78.04	100,00
Jak-Bar	14.67	13.47	1.94	70.42	100,00
Jak-Ut	7.44	7.35	2.05	83.16	100,00
DKI	15.76	18.79	2.12	63.33	100,00

**Tabel 17. Tempat memperoleh kebutuhan pangan
Tahun 1999**

Lokasi	Tempat memperoleh kebutuhan pangan					Jumlah
	Pedagang Keliling	Warung	Pasar	Swalayan	Lainnya	
Jak Bar	3,47	25,28	68,61	0,28	2,36	100,00
DKI	9,74	32,74	55,35	0,41	1,76	100,00

Tabel 18. Rata pengeluaran perkapita perbulan kelompok makanan dan non makanan Th 1998 – 1999

Kelompok	1998	1999
Makanan	78.408	153.068
Non Makanan	99.005	174.926

Tabel 19. Presentase rumah tangga yang mengalami kesulitan keuangan selama setahun yang lalu menurut kotamadya Th 1999

Kotamadya	Mengalami Kesulitan		Jumlah
	Ya	Tidak	
Jak-Sel	62,32	37,68	100,00
Jak-Tim	43,91	56,09	100,00
Jak-Pus	68,63	31,37	100,00
Jak-Bar	62,92	37,08	100,00
Jak-Ut	59,66	42,34	100,00
	57,11	42,89	100,00

Tabel 20. Persentase rumah tangga yang mengalami kesulitan keuangan selama setahun yang lalu, pihak yang dihubungi untuk mengatasinya menurut kotamadya Th 1999

Kotamadya	Pihak yang dihubungi				
	Bank/Kop	Sdr/Famili	Tetangga	Retenir	Lainya
Jak-Sel	5.05	31.31	32.32	2.53	28.79
Jak-Tim	8.60	59.14	23.12	0.18	8.96
Jak-Pus	4.74	44.71	29.10	2.65	18.78
Jak-Bar	4.23	55.60	25.79	0.42	13.95
Jak-Ut	12.28	55.26	19.30	1.63	11.53
DKI	8.06	52.60	24.07	1.29	13.97

<https://jakbarkota.bps.go.id>